BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tentang perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1).

Berdasarkan analisis penulis, meskipun dasar hukum yang digunakan sama namun terdapat perbedaan pemahaman Majelis Hakim atas pasal tersebut. Majelis Hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb menyatakan bahwa kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama hanya diperkenankan apabila dikumulasikan dengan perceraian karena dua perkara tersebut adalah penggabungan *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda). Sedangkan Majelis Hakim dalam putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg persoalan penggabungan *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda) telah selesai dengan adanya pasal tersebut. Pertimbangan hukumnya juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil

Kamar Agama Tahun 2015, pada angka 2 hasil rapat Kamar Agama dinyatakan bahwa, perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian.

2. Amar putusan tentang kumulasi gugatan yang terdapat pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan mengandung cacat formil. Adapun amar putusan tentang kumulasi gugatan pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg yaitu Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat yang berarti menyatakan kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima.

Berdasarkan analisis penulis, perbedaan ini akhirnya melahirkan disparitas putusan pada kasus hukum yang sama dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum atas kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) maka seharusnya Majelis Hakim sepakat dalam memahami pasal tersebut yaitu membolehkan adanya kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama meskipun tidak dikumulasikan dengan perceraian. Berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dengan diterimanya kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama akan menjadi jalan untuk mewujudkan dan memaksimalkan penerapan asas tersebut.

B. Saran

Saran yang penulis berikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Para Hakim di Pengadilan mana pun seharusnya sepakat dalam memahami aturan yang membolehkan kumulasi gugatan perkara-perkara akibat perceraian sehingga tercipta kepastian hukum atas perkara tersebut dan dengan diselesaikannya perkara kumulasi gugatan maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akan terlaksana lebih maksimal. Selain itu, diharapkan pula putusan hakim yang diberikan kepada pencari keadilan juga memuat nilai keadilan dan kemanfaatan.
2. Berkaitan dengan perkara kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama ataupun perkara akibat perceraian yang lainnya, para peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian empiris.